

Ongkos Berdemokrasi

Sejak reformasi digulirkan, maka kehidupan berdemokrasi dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Rakyat merasa ikut menjadi bagian penting dalam kehidupan di negeri ini. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Berorganisasi diberi kebebasan seluas-luasnya. Mereka tidak takut menyampaikan ide, pendapat dan aspirasinya secara terbuka. Masuk dalam organisasi sosial dan politik apa saja, tidak ada seorang pun menghalangi. Pemerintah benar-benar memberikan peluang berpartisipasi dalam politik seluas-luasnya. Sudah barang tentu semua itu, sepanjang berada pada koridor yang telah disepakati bersama.

Istilah demokrasi sesungguhnya sudah dikenal sejak jauh sebelum negeri ini merdeka. Semua pimpinan negara dari periode ke periode juga telah menyuarakan betapa bagusnya demokrasi dijalankan. Mereka juga telah menilai bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk mengelola negeri yang bhineka ini. Hanya saja, suara itu belum pernah menjadi kenyataan secara utuh. Mengatakan berdemokrasi terus menerus pada setiap waktu sebatas untuk menutupi agar tidak terasa bahwa yang berjalan sesungguhnya tidak demokratis. Demokrasi dimaknai oleh pemegang kekuasaan dengan arti yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kepentingan yang sedang dihadapi. Itulah sesungguhnya yang terjadi selama ini.

Satu di antara bagian berdemokrasi, rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya menentukan pemimpinnya, terutama pemimpin politik. Mulai jabatan Bupati, Wali kota, Gubernur dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebelum itu, rakyat hanya memilih para wakilnya duduk di lembaga politik, yaitu DPRD dan DPR. Dahulu sebelumnya, kalaupun tokh, ada pemilihan pemimpin, dilakukan sebatas memilih kepala desa. Pemilihan penguasa terkecil ini, dilakukan secara langsung oleh rakyat sudah cukup lama di tanah air ini. Oleh karena itu tatkala keputusan politik, di mana rakyat diberi keleluasaan untuk melakukan pilihan langsung terhadap pejabat politik ---bupati, walikota, Gubemur dan Presiden, tidak mengalami hambatan yang berarti karena rakyat sudah memiliki pengalaman memilih pemimpin, sekalipun pada skala kecil, yaitu memilih pemimpin tingkat desa.

Secara teoritik memilih pemimpin sebagai bagian dari demokrasi, tidaklah sulit dan juga tidak memerlukan biaya mahal. Para calon pemimpin di setiap komunitas pada skala apapun sudah ada. Kadangkala Jumlahnya memang banyak. Oleh sebab itulah diperlukan pemilihan. Selain jumlah calon pemimpin itu banyak, juga setiap orang, kelompok orang memiliki tipe ideal pemimpin masing-masing. Seseorang calon dianggap ideal oleh sekelompok orang, tetapi tidak dinilai sama oleh komunitas lainnya.

Berdemokrasi untuk mendapatkan seorang pemimpin yang menjadi pilihan terbanyak, maka dilakukan pemilihan secara langsung. Tetapi, apakah dengan lewat cara itu selalu didapatkan pemimpin yang benar-benar terbaik ? Harapannya , setidaknya-tidaknya adalah seperti itu. Paling tidak, mereka yang terpilih, adalah orang yang disenangi oleh mereka yang memilihnya. Pengertian disenangi atau kurang disenangi, tidaklah selalu menunjukkan orang yang terbaik, apalagi ukuran baik dan tidak baik menurut normatif pandangan hidup tertentu, misalnya ajaran agama, kepercayaan, asal usul daerah kehalhiran dan seterusnya. Pandangan tentang kebenaran, apalagi menyangkut kesenangan banyak orang tidak sama dengan kebenaran normatif sebuah ajaran agama. Masyarakat penjudi, tentu tidak akan

menganggap baik terhadap orang-orang yang sehari-hari mencegah terjadinya perjudian dan seterusnya.

Selain itu konsekuensinya, demokrasi ternyata juga harganya sangat mahal. Hal yang tampak jelas, ketika dilakukan pemilihan pemimpin di berbagai level itu diperlukan publikasi, sosialisasi dan proses-proses lain yang harganya tidak sedikit. Kita lihat berapa ongkos pemilihan bupati, wali kota, gubernur dan apalagi presiden. Contoh sederhana, biaya resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemilihan gubernur Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, kabarnya tidak kurang dari 800 milyar. Dan itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat. Kita tidak bisa memprediksi, karena memang belum berpengalaman, berapa dana yang dikeluarkan untuk kampanye---mulai dari membeli spanduk, baligho, iklan di TV, radio, koran dalam waktu yang sekian lama, tentu besar sekali.

Besarnya harga demokrasi tidak saja berupa uang, tetapi juga dalam bentuknya yang lain. Masyarakat menjadi berkelompok-kelompok partai yang sekian banyak. Padahal belum semua warga masyarakat sadar bahwa sesungguhnya perbedaan itu hanyalah sebatas aspirasi, keinginan, prioritas dan bahkan akhir-akhir ini, hanya dimaksudkan sebatas untuk meraih posisi-posisi penting di wilayah kekuasaan. Target mereka agar menang saja dan kemudian berkuasa. Siapa yang akan dikuasai, tidak lain adalah rakyat yang diajak untuk pemilihan itu.

Memang berbeda dengan dulu, mereka berpartai memperjuangkan ideologi, keyakinan, pandangan hidup yang dianggap benar. Saat sekarang hal itu rupanya sudah tidak ada lagi. Buktinya, lihat saja tatkala partai politik berkualisi. Jika kualisi itu berdasar ideologi, pandangan hidup atau keyakinan yang ingin diperjuangkan, maka akan bersifat linier, seragam atas komando dari tingkat pusat hingga level yang paling kecil. Misalnya kualisi partai yang berlabel Islam, maka di sana akan terdapat PPP, PKS, PKNU, PAN, PKB dan lain-lain. Tetapi karena orientasi sebatas untuk menang maka kualisi itu sangat bervariasi, di satu wilayah antara PDIP, PKS, GOLKAR. Di tempat lain berbeda lagi misalnya PDIP, PPP, PKNU dan seterusnya. Kondisi seperti ini, bagi yang menyadari akan merasa kecapekan, menguras energi, tetapi tidak ada hasil. Semua hanyalah bersifat praktis dan pragmatis, untuk hari ini dan bahkan hanya sebatas untuk meraih kekuasaan yang ujung-ujungnya adalah keuntungan jangka pendek, yaitu jabatan, kedudukan, posisi-posisi penting dan uang. Demokrasi akhirnya menjadi tidak mulia, yakni memperjuangkan keyakinan, pandangan hidup dan rakyat.

Seleksi calon pemimpin yang berjalan seperti itu, kiranya sulit berhasil diperoleh sosok ideal pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sebab senyatanya yang terjadi di lapangan adalah proses-proses transaksional yang luar biasa. Para calon harus memperkenalkan dirinya sebagai orang yang layak dipilih, dengan biaya mahal sekalipun. Para pemilih pun juga tahu, bahwa biaya itu suatu saat harus kembali. Padahal pemimpin yang ideal adalah orang yang mampu mencintai mereka yang dipimpinnya, dan begitu juga sebaliknya, dipercayai dan dicintai oleh rakyatnya. Namun, kenyataan yang tampak selama ini, belum seperti itu. Yang terjadi, bahwa ikatan antara pemimpin dan yang dipimpin bukan cinta, kasih sayang, kepedulian, tetapi adalah uang atau fasilitas lainnya. Karena itu demokrasi untuk memilih pemimpin yang benar dan benar-benar pemimpin, ternyata mahal harganya dan sangat sulit dilakukan. Apalagi di zaman ketika orang lagi bernafsu besar mendintai harta dan jabatan ini. Allahu a'lam